

Ketidakpedulian Terdidik Di Komunitas Pesisir: Analisis Melalui Perspektif Akuntansi Perilaku

Fety Widiyanti Aptasari¹⁾, Muhammad Helmi Falah²⁾, Budiman³⁾, Baiq Krisnina Maharani Putri⁴⁾

^{1,2,3,4)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

¹⁾fetyaptasari@staff.unram.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's coastal communities have great potential in managing marine resources but are still trapped in various challenges, especially in terms of environmental awareness. Poverty, low education levels, and cognitive biases such as status quo bias make them increasingly marginalized from environmental policies. Lack of trust in institutions and the dominance of individualistic values further exacerbate the disengagement of coastal communities towards collective action. In addition, the high use of single-use plastics is triggered by economic factors and the lack of incentives to switch to more environmentally friendly behavior. This study uses a behavioral accounting approach and Systematic Literature Review (SLR) to understand how economic and psychological factors shape the behavior of coastal communities toward environmental issues. The results of the analysis show that without incentive-based policies and more systematic education, behavior change is difficult to occur. Therefore, a co-management approach that actively involves communities in natural resource management is needed, as well as incentive-based strategies that can foster a sense of ownership of environmental policies. With the right interventions, inclusive and sustainable coastal development can be achieved, bringing ecological benefits and community welfare together.

ABSTRAK

Masyarakat pesisir Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya laut, namun masih terjebak dalam berbagai tantangan, terutama dalam hal kepedulian terhadap lingkungan. Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta bias kognitif seperti status quo bias menjadikan mereka semakin terpinggirkan dari kebijakan lingkungan. Kurangnya kepercayaan terhadap institusi dan dominasi nilai individualisme semakin memperparah disengagement masyarakat pesisir terhadap aksi kolektif. Selain itu, kebiasaan penggunaan plastik sekali pakai yang tinggi dipicu oleh faktor ekonomi dan kurangnya insentif untuk beralih ke perilaku yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan akuntansi keperilakuan dan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk memahami bagaimana faktor ekonomi dan psikologis membentuk perilaku masyarakat pesisir terhadap isu lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa kebijakan yang berbasis insentif dan edukasi yang lebih sistematis, perubahan perilaku sulit terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan co-management yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, serta strategi berbasis insentif yang dapat menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan lingkungan. Dengan intervensi yang tepat, pembangunan pesisir yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai, membawa manfaat bagi ekologi dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.

Kata kunci: pesisir; akuntansi keperilakuan; co-management; pemberdayaan

1. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah. Potensi ekonomi kemaritiman Indonesia mencakup 11 sektor dengan nilai sekitar USD 1,4 triliun (BRIN, 2024). Namun, potensi ini belum sepenuhnya terwujud dalam kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Pada triwulan III tahun 2024, sektor perikanan menyumbang 2,25% dari PDB Indonesia (KKP, 2024). Permasalahan pengelolaan sumber daya kelautan tidak hanya pada rendahnya kontribusinya terhadap PDB Indonesia, tetapi juga pada rendahnya kesejahteraan nelayan

Indonesia. Setidaknya 25% nelayan di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan (BRIN, 2023).

Salah satu indikator rendahnya optimalisasi potensi perikanan Indonesia adalah kesejahteraan nelayan yang masih tertinggal. Jumlah nelayan di Indonesia terus mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir sebagaimana dilaporkan oleh dokumen Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2021. Pada tahun 2010 jumlah nelayan tercatat sebanyak 2.16 juta orang. Namun pada tahun 2019 lalu, jumlahnya tercatat hanya 1.83 juta orang. Dengan demikian, terdapat penurunan jumlah

nelayan sebanyak 330.000 orang dalam kurun waktu tahun 2010–2019 (Walhi, 2022).

Tidak hanya nelayan tangkap, nelayan budidaya juga mengalami penurunan drastis. Jumlah nelayan pada tahun 2012 sebanyak 4,5 juta jiwa, tetapi pada tahun 2020 jumlah tersebut berkurang lebih dari setengahnya dan menyisakan 2,2 juta jiwa (KKP, 2023). Penurunan ini tidak hanya mencerminkan tekanan ekonomi, tetapi juga kompleksitas masalah seperti akses pendidikan, terbatasnya pengetahuan manajerial, serta pengelolaan sumber daya yang tidak efisien.

Di sisi lain, tingkat pendidikan masyarakat pesisir menjadi salah satu penghalang utama. Data dari Direktorat Sekolah Dasar (DITPSD) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menunjukkan 80% nelayan kecil hanya mengenyam pendidikan di bawah tingkat SMP (Doaly, 2023). Keluarga dengan ekonomi rendah ditambah rendahnya pendidikan yang dimiliki, akan menjadikannya kesulitan dalam membuat perencanaan keuangan (Cheng et al., 2023)

Pendidikan yang rendah juga mengurangi kemampuan nelayan untuk memahami dan mengaplikasikan teknologi atau metode baru dalam pengelolaan perikanan. Kurangnya pemahaman ini memperburuk lingkaran kemiskinan, di mana nelayan tidak dapat meningkatkan hasil tangkapan atau diversifikasi usaha mereka. Akibatnya, mereka cenderung bergantung pada praktik tradisional yang kurang adaptif terhadap tantangan modern, seperti perubahan iklim dan fluktuasi pasar.

Selain tantangan ekonomi, komunitas pesisir menghadapi ancaman serius dari pencemaran lingkungan. Plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem laut. Plastik yang dibuang sembarangan akan terurai menjadi mikroplastik, yang kemudian mencemari perairan dan masuk ke rantai makanan (Chen et al., 2021). Biota laut, seperti penyu dan ikan, sering kali terperangkap atau mengonsumsi plastik, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas ikan yang dikonsumsi manusia.

Kajian *Ocean Health Index* (OHI) pada tahun 2020 menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-137 dari 221 negara berdasarkan tingkat kesehatan lautnya dengan skor 65 dari skala 100. Skor tersebut berada cukup jauh di bawah rata-rata dunia, yaitu 71. Berdasarkan kajian yang sama, kondisi lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (Clawson & Frazier, 2020).

Pencemaran plastik tidak hanya membahayakan ekosistem, tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan masyarakat pesisir. Sebagai sumber protein utama, ikan berperan penting dalam pemenuhan gizi masyarakat pesisir. Namun, pencemaran mikroplastik menurunkan kualitas ikan,

yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan manusia. Ketahanan pangan menjadi semakin terancam, terutama di kalangan anak-anak, yang rentan terhadap masalah gizi buruk, termasuk stunting.

Krisis iklim merupakan tantangan besar lain yang dihadapi masyarakat pesisir. Pemanasan global telah menyebabkan peningkatan suhu air laut, yang mengubah pola migrasi ikan. Banyak spesies ikan bermigrasi ke daerah yang lebih dingin, seperti ke arah kutub atau perairan yang lebih dalam (Pinsky et al., 2013). Kondisi ini menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan di wilayah tropis seperti Indonesia.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2022) melaporkan bahwa perubahan iklim akan semakin memperburuk ketahanan pangan di wilayah tropis. Penurunan stok ikan di perairan Indonesia tidak hanya mengancam pendapatan nelayan, tetapi juga mengurangi akses masyarakat terhadap sumber protein hewani yang penting. Kekurangan akses ini berdampak langsung pada kesehatan anak-anak, yang menghadapi risiko defisiensi nutrisi.

Stunting menjadi salah satu dampak nyata dari kurangnya akses terhadap makanan bergizi. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4% (Quamme & Iversen, 2022). Masalah ini menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak, mengurangi kapasitas mereka untuk berkontribusi secara produktif di masa depan. Krisis iklim, yang memperburuk akses terhadap ikan berkualitas, dapat memperpanjang siklus kemiskinan di komunitas pesisir.

Sebagai respons terhadap ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, mitigasi berbasis alam menjadi solusi yang relevan. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam melindungi wilayah pesisir dari abrasi, banjir, dan rob. Selain itu, mangrove berfungsi sebagai tempat budidaya ikan dan kepiting, yang mendukung ketahanan pangan masyarakat pesisir.

Mangrove juga menjadi penyimpan karbon alami yang efektif, membantu mengurangi dampak pemanasan global. Dengan memperluas program rehabilitasi mangrove, masyarakat pesisir dapat memperoleh manfaat ganda: perlindungan dari bencana alam dan peningkatan kesejahteraan melalui perikanan berkelanjutan. Program-program ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk nelayan terdidik, yang dapat memainkan peran kunci dalam keberhasilannya.

Ironisnya, nelayan terdidik yang diharapkan menjadi agen perubahan justru sering kali menunjukkan ketidakpedulian terhadap aksi kolektif. Akuntansi perilaku memberikan wawasan mendalam tentang fenomena ini. Perspektif ini menyoroti bagaimana faktor psikologis, sosial, dan budaya

memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu alasan utama adalah kurangnya kepercayaan terhadap institusi dan aksi kolektif (Falah & Aptasari, 2023). Nelayan terdidik cenderung merasa bahwa usaha mandiri lebih menjanjikan dibandingkan partisipasi dalam aksi kolektif. Selain itu, nilai-nilai individualisme yang berkembang di kalangan nelayan terdidik bertentangan dengan budaya gotong royong yang biasanya kuat di komunitas pesisir.

Motivasi intrinsik dan ekstrinsik juga memainkan peran penting. Rendahnya insentif ekonomi untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif membuat banyak nelayan terdidik enggan melibatkan diri. Mereka cenderung fokus pada keuntungan jangka pendek daripada investasi dalam solusi kolektif yang memerlukan waktu dan usaha lebih (Acheson, 1981; Suhartanti, 2022). Faktor sosial dan ekonomi memperburuk ketidakpedulian ini. Pencemaran lingkungan, fluktuasi harga hasil tangkapan, dan tekanan ekonomi membuat banyak nelayan merasa lebih aman dengan mengelola usaha mereka sendiri. Ketakutan akan risiko kegagalan kolektif menjadi salah satu alasan utama mengapa nelayan terdidik cenderung memilih jalur individualisme (Zulfa & Susanti, 2023).

Selain itu, perilaku konsumtif yang masih dominan di komunitas pesisir turut memengaruhi pola pikir ini. Ketergantungan pada kebutuhan jangka pendek menghambat upaya untuk membangun keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Sebagian besar nelayan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan mendesak daripada berinvestasi dalam proyek jangka panjang yang memerlukan komitmen kolektif (Falah & Aptasari, 2023).

Untuk mengatasi fenomena ini, dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah desa, misalnya, dapat memainkan peran strategis dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya aksi kolektif. Dengan memanfaatkan dana desa, pelatihan tentang pengelolaan sumber daya dan mitigasi berbasis alam, seperti rehabilitasi mangrove, dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, penguatan regulasi terkait penggunaan plastik sekali pakai dan promosi bahan ramah lingkungan sangat penting. Kebijakan ini perlu diiringi dengan insentif yang mendorong partisipasi masyarakat, seperti subsidi atau penghargaan untuk komunitas yang berhasil mengurangi pencemaran lingkungan.

Dari perspektif akuntansi perilaku, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi nelayan terdidik untuk berkolaborasi. Pendekatan berbasis komunitas yang mengutamakan insentif sosial, seperti pengakuan atau penghargaan, dapat membantu meningkatkan partisipasi. Program-

program ini harus dirancang untuk menciptakan kepercayaan dan rasa memiliki di kalangan nelayan, sehingga mereka melihat aksi kolektif sebagai solusi yang menguntungkan.

Ketidakpedulian terdidik di komunitas pesisir merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Meskipun banyak penelitian menyoroti tantangan ekonomi, lingkungan, dan teknis di wilayah pesisir, isu ketidakpedulian terdidik masih jarang dibahas secara mendalam. Padahal, kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi seharusnya dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial dan lingkungan.

Pendekatan akuntansi perilaku memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya memengaruhi pengambilan keputusan di komunitas pesisir. Sayangnya, dalam banyak kasus, individu yang memiliki pengetahuan lebih justru menjadi hambatan dalam aksi kolektif karena berbagai alasan, termasuk ketidakpercayaan terhadap efektivitas perubahan atau keterbatasan insentif yang mendorong partisipasi aktif.

Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan strategi yang tepat, seperti edukasi yang berbasis kesadaran lingkungan, pemberian insentif bagi perilaku proaktif, serta rehabilitasi berbasis alam yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah konsep ekonomi sirkular, yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di komunitas pesisir (Kristianto et al., 2022). Dengan strategi ini, diharapkan komunitas pesisir dapat lebih berdaya dalam mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang mereka hadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpedulian terdidik di komunitas pesisir melalui perspektif akuntansi perilaku. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan psikologis, sosial, dan ekonomi yang menghalangi partisipasi nelayan terdidik dalam aksi kolektif, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong kolaborasi dan keberlanjutan di komunitas pesisir.

Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang akuntansi perilaku dalam konteks sosial-ekonomi komunitas pesisir, sambil memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara pendidikan, kepercayaan sosial, dan perilaku kolektif. Secara praktis, penelitian ini menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan menjadi landasan strategis dalam mengatasi ketidakpedulian terdidik di komunitas pesisir sekaligus memaksimalkan potensi kelautan Indonesia secara berkelanjutan

2. TINJAUAN PUSTAKA

Ketidakpedulian terdidik

Ketidakpedulian terdidik adalah sikap di mana seseorang yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas memilih untuk tidak peduli atau bersikap apatis terhadap isu-isu sosial, politik, atau kemanusiaan (Diaz-Strong, 2025). Meskipun memahami masalah yang ada, mereka tetap diam atau tidak mengambil tindakan karena alasan kenyamanan, kepentingan pribadi, atau keyakinan bahwa upaya mereka tidak akan membawa perubahan yang berarti.

Teori Kemiskinan Struktural

Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak mendukung kesejahteraan masyarakat tertentu (Zhao et al., 2022). Dalam konteks komunitas pesisir, keterbatasan akses terhadap pendidikan, modal, dan teknologi menjadi faktor utama yang mempersulit mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Teori Perilaku Ekonomi dan Akuntansi Perilaku

Akuntansi perilaku meneliti bagaimana faktor psikologis, sosial, dan budaya memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi (Hanlon et al., 2022). Dalam konteks nelayan terdidik, keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam aksi kolektif dapat dijelaskan melalui konsep *bounded rationality*, di mana mereka lebih memilih keuntungan jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang dalam aksi kolektif (Kahneman & Tversky, 1979).

Teori Perubahan Sosial

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial di komunitas dapat terjadi melalui proses internal (kesadaran dan pendidikan) maupun eksternal (kebijakan dan insentif ekonomi) (Avelino, 2021). Dalam konteks penelitian ini, kebijakan rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan ekonomi nelayan dapat menjadi faktor pendorong perubahan sosial yang lebih inklusif.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menggali lebih dalam hubungan antara kemiskinan, perilaku masyarakat pesisir, dan pengelolaan lingkungan dalam perspektif akuntansi keperilakuan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola dan tren dari penelitian sebelumnya serta memberikan sintesis temuan yang lebih sistematis.

Sumber data utama terdiri dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terbaru yang relevan dengan topik penelitian ini. Literatur dikumpulkan dari database akademik terindeks seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan JSTOR, dengan kata kunci pencarian seperti “*poverty and the environment*”, “*behavioral accounting*”, dan “*plastic waste management*”. Untuk menjaga relevansi, artikel yang digunakan berasal dari 5 tahun terakhir, kecuali untuk *grand theory* yang masih relevan sebagai dasar analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan tema-tema utama, seperti (1) Faktor ekonomi dan keterbatasan akses terhadap alternatif ramah lingkungan ; (2) Pengaruh tingkat pendidikan dalam membentuk perilaku konsumsi (3) Bias keputusan dalam memilih produk berbasis biaya rendah; (4) Efektivitas insentif ekonomi dalam mengubah perilaku konsumsi

Dalam konteks akuntansi keperilakuan, keputusan individu sering kali didasarkan pada informasi yang tersedia serta pertimbangan biaya dan manfaat jangka panjang (de Bruijn & Antonides, 2022). Namun, keterbatasan ekonomi di komunitas pesisir membuat keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh biaya langsung yang lebih rendah, meskipun ada kesadaran akan dampak lingkungan dari penggunaan plastik sekali pakai. Oleh karena itu, sintesis temuan dari berbagai literatur ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap plastik sekali pakai. Data yang dikumpulkan melalui kajian literatur dianalisis menggunakan pendekatan akuntansi keperilakuan, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpedulian masyarakat terhadap isu lingkungan serta kemungkinan intervensi yang dapat diterapkan untuk mengubah pola konsumsi mereka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakpedulian Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam di Komunitas Pesisir

Ketidakpedulian terhadap pengelolaan sumber daya alam di komunitas pesisir merupakan masalah mendasar yang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut. Masyarakat pesisir sering kali kurang terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan, baik karena kurangnya pemahaman maupun ketidakmampuan untuk mengakses solusi yang lebih ramah lingkungan (Etim, 2024). Untuk memahami lebih lanjut faktor-faktor yang memperburuk masalah ini, penting untuk menelusuri

bagaimana pendekatan pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat berperan dalam memperparah ketidakpedulian ini.

Fenomena ketidakpedulian masyarakat terdidik di wilayah pesisir terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan isu yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam dari perspektif akuntansi keperilakuan (Septanti et al., 2023). Masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan kelompok adat, memiliki pengetahuan lokal yang kaya dan hubungan erat dengan ekosistem alam (Vierros et al., 2020). Namun, partisipasi mereka dalam program pengelolaan lingkungan seringkali terbatas (Dias et al., 2020; Gómez & Maynou, 2021; Burgos-Ayala et al., 2022).

Dari perspektif akuntansi keperilakuan, perilaku ini dapat dijelaskan melalui interaksi antara faktor psikologis, sosial, dan budaya (Hanlon et al., 2020). Salah satu teori utama yang relevan adalah *Theory of Planned Behavior*, yang mengemukakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Dalam konteks ini, sikap masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sumber daya sering kali dipengaruhi oleh pengalaman buruk dengan kebijakan sebelumnya yang tidak memberikan hasil sesuai ekspektasi (Gerungan et al., 2024). Norma sosial di komunitas juga berperan, di mana ketidakpercayaan terhadap institusi pengelola menciptakan resistensi kolektif terhadap partisipasi dalam program berkelanjutan (Jasmin, 2024).

Selain itu, teori *Behavioral Decision-Making* memberikan wawasan tentang bagaimana ketidakpastian manfaat jangka panjang dan persepsi risiko memengaruhi pengambilan keputusan (Tversky & Kahneman, 1974). Dalam situasi komunitas pesisir, keputusan untuk tidak terlibat dalam aksi kolektif sering kali didasarkan pada heuristik dan bias kognitif, seperti keengganan kehilangan (*loss aversion*) atau fokus pada hasil jangka pendek yang lebih pasti (Wade & Biedenweg, 2024). Faktor-faktor ini dapat menjelaskan mengapa masyarakat terdidik, meskipun memiliki akses lebih besar terhadap informasi, tetap ragu untuk berpartisipasi (Voo et al., 2021).

Perilaku masyarakat terdidik di komunitas pesisir menunjukkan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran ekologis (Zikargae et al., 2022). Akuntansi keperilakuan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dan pendekatan berbasis konteks dalam mengubah pola perilaku (Demirci et al., 2024). Teori *Social Learning* (Bandura, 1977) juga relevan, yang menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi dan interaksi sosial. Dalam hal ini, intervensi yang melibatkan tokoh masyarakat atau kelompok panutan lokal dapat lebih efektif dalam

memengaruhi perilaku kolektif (Falah & Aptasari, 2023).

Dengan memahami bahwa keputusan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor *non-monetary* seperti kepercayaan sosial dan persepsi risiko, akuntansi keperilakuan menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan efektif dalam merancang kebijakan (Ali & Hasan, 2024). Misalnya, pendekatan *Participatory Budgeting* dalam konteks pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dirancang (Buele et al., 2020). Langkah ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memahami motivasi dasar yang menghambat partisipasi masyarakat terdidik dan memprioritaskan strategi yang berorientasi pada kebutuhan lokal.

Dampak Pembangunan Pesisir dengan Pendekatan Top-Down dalam Perspektif Akuntansi Keperilakuan

Konsep ketidakpedulian terdidik dan perspektif akuntansi keperilakuan memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami dampak pendekatan *top-down* dalam pembangunan pesisir. Ketidakpedulian terdidik terjadi ketika individu berpengetahuan tetap pasif terhadap isu lingkungan akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan konteks lokal atau melibatkan masyarakat (Diaz-Strong, 2025). Dalam konteks ini, pendekatan *top-down* yang sering diterapkan di kawasan pesisir, menciptakan ketidakselarasan antara pihak pengambil keputusan (*principal*) dan masyarakat lokal (*agent*), sebagaimana dijelaskan dalam teori agency (Budianto et al., 2023).

Masyarakat yang merasakan alienasi dari kebijakan tersebut menjadi enggan terlibat dalam program-program lingkungan, meskipun mereka memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan berkelanjutan (Putra et al., 2023). Ketidakpedulian ini muncul bukan karena kurangnya pengetahuan, melainkan karena minimnya rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang dianggap jauh dari kebutuhan lokal (Yaslan et al., 2023).

Dari sudut pandang akuntansi keperilakuan, ketidakpedulian terdidik juga dipengaruhi oleh bias kognitif. Bias kognitif tersebut seperti *status quo* bias, yang membuat masyarakat mempertahankan praktik lama, dan *temporal discounting* (Hertwig et al., 2024), di mana masyarakat lebih memilih keuntungan jangka pendek seperti peningkatan pendapatan melalui eksploitasi sumber daya alam dibandingkan manfaat jangka panjang seperti pelestarian lingkungan (Aptasari et al., 2024a). Dalam kasus pembangunan pesisir, fokus pada eksploitasi sumber daya untuk hasil ekonomi langsung sering kali mengabaikan manfaat non-finansial, seperti keberlanjutan ekosistem atau

kualitas hidup jangka panjang (Aptasari et al., 2024b).

Pendekatan *top-down* juga seringkali mengabaikan dimensi akuntansi sosial, yaitu pentingnya pengungkapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Masyarakat lokal yang tidak dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam merasa bahwa kebijakan tersebut bukan bagian dari tanggung jawab mereka, sehingga mereka cenderung mengabaikan dampaknya (Marasabessy, 2018). Dalam konteks ini, transparansi dan partisipasi dalam perencanaan program menjadi penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi disengagement (Lathifah et al., 2024).

Selain itu, teori *Common-Pool Resource* (CPR) menunjukkan bahwa pengelolaan kolektif, dengan keterlibatan aktif masyarakat lokal, lebih efektif dibandingkan pendekatan *top-down* yang hierarkis (van Klinger & de Graaf, 2021). Akuntansi keperilakuan menyoroti bahwa prinsip partisipatif tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan, tetapi juga mengintegrasikan motivasi intrinsik masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam (Alhasnawi et al., 2023). Dalam pendekatan ini, masyarakat terdidik dapat menjadi agen perubahan, tetapi hanya jika mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (Marasabessy et al., 2023).

Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak negatif pendekatan *top-down*, diperlukan perubahan paradigma menuju *co-management*, di mana masyarakat lokal diberikan ruang untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas sosial, tetapi juga mendorong masyarakat terdidik untuk berpartisipasi aktif, mengurangi fenomena ketidakpedulian terdidik, dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Njifonjou et al., 2006).

Peran Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Akuntansi Keperilakuan

Konsep ketidakpedulian terdidik sangat relevan dalam memahami tantangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat pesisir terkait pengelolaan sumber daya alam (Md et al., 2022). Ketidakpedulian terdidik merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok yang memiliki tingkat pendidikan tertentu tetap pasif atau tidak mengambil tindakan terhadap isu lingkungan (Suryawan et al., 2024). Dalam perspektif akuntansi keperilakuan, kondisi ini dapat dijelaskan melalui interaksi antara faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi pengambilan keputusan (Constantino et al., 2021).

Meskipun masyarakat pesisir yang terdidik memiliki akses terhadap informasi dan pengetahuan

tentang pentingnya keberlanjutan, keputusan mereka sering dipengaruhi oleh present bias, sebagaimana dijelaskan dalam teori *Behavioral Economics* (Wade & Biedenweg, 2024). Bias ini membuat masyarakat lebih mengutamakan manfaat langsung, seperti kemudahan atau keuntungan ekonomi jangka pendek, daripada dampak jangka panjang seperti pelestarian lingkungan (Aptasari et al., 2024a). Ketidakpedulian ini juga dapat diperburuk oleh kurangnya rasa kepemilikan terhadap kebijakan atau program yang dirancang secara hierarkis tanpa partisipasi masyarakat lokal.

Dari perspektif akuntansi keperilakuan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi alat strategis untuk mengatasi bias ini. Teori *Social Learning* (Bandura, 1977) menyoroti bahwa perubahan perilaku dapat terjadi melalui interaksi sosial dan observasi. Dalam konteks masyarakat pesisir, pendidikan berbasis komunitas yang melibatkan praktik nyata dalam pengelolaan ekosistem pesisir dapat mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola pikir keberlanjutan (Vasseur, 2021). Selain itu, penguatan *peer accountability* melalui pendekatan partisipatif, seperti *co-management*, meningkatkan tekanan sosial positif untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap sumber daya alam (Ortiz-Riomalo et al., 2022).

Pemberdayaan masyarakat juga terkait erat dengan akuntansi partisipatif, di mana keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan membantu mengatasi disengagement dan meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif (Lehtonen & Radzik-Maruszak, 2024). Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktor aktif yang berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam (Litvinenko et al., 2022). Akuntansi keperilakuan mendukung penerapan sistem penghargaan atas kontribusi kolektif untuk memotivasi perilaku berkelanjutan (Chen et al., 2021).

Pendidikan yang relevan dan berbasis pada kebutuhan lokal juga membantu masyarakat memahami nilai keberlanjutan dari perspektif yang lebih luas (Ferguson et al., 2021). Dalam hal ini, pengembangan sektor ekowisata menjadi salah satu implementasi praktis yang dapat memperkuat kesadaran masyarakat (Huang et al., 2022). Sektor ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menekankan pentingnya konservasi lingkungan sebagai aset utama (Samal & Dash, 2023). Dengan demikian, masyarakat mulai melihat keberlanjutan sebagai bagian integral dari kesejahteraan mereka sendiri (Mustofa et al., 2022).

Melalui pendidikan dan pemberdayaan yang dirancang dengan pendekatan berbasis akuntansi keperilakuan, ketidakpedulian terdidik dapat diatasi secara bertahap. Pendekatan ini membantu masyarakat pesisir menginternalisasi nilai-nilai

keberlanjutan, mengubah pola pikir mereka, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peran Ekowisata dalam Pengelolaan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir

Ekowisata merupakan alternatif yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pelestarian lingkungan (Aseres & Sira, 2020). Dalam hal ini, pemahaman tentang keberlanjutan lingkungan perlu diterapkan secara lebih luas melalui model ekowisata yang berbasis pada keterlibatan masyarakat (Sobhani et al., 2022). Namun, efektivitas ekowisata dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya alam pesisir sangat dipengaruhi oleh faktor sosial yang mempengaruhi keputusan individu dalam mendukung inisiatif tersebut (Rahman et al., 2021).

Ekowisata di kawasan pesisir menawarkan potensi besar sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Casimiro et al., 2023). Dalam perspektif akuntansi keperilakuan, peran ekowisata dapat dianalisis melalui interaksi antara nilai ekonomi, sosial, dan ekologis yang memengaruhi perilaku masyarakat lokal, wisatawan, dan pemangku kepentingan lainnya (Lee et al., 2021). Keindahan ekosistem pesisir, seperti terumbu karang, mangrove, dan pantai, merupakan aset yang bernilai tinggi, tetapi keberlanjutannya bergantung pada cara masyarakat dan wisatawan memahami serta menghargai batas daya dukung kawasan tersebut.

Dari sisi akuntansi keperilakuan, penerapan prinsip *nudging* menjadi relevan dalam mendorong perilaku konservasi (Zhang et al., 2022). Misalnya, penyediaan informasi yang jelas tentang dampak aktivitas pariwisata terhadap ekosistem, atau pemberian insentif bagi wisatawan yang memilih layanan ramah lingkungan, dapat membantu membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab. Strategi ini dapat memperkuat pengambilan keputusan yang tidak hanya mengutamakan manfaat ekonomi jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan kelestarian sumber daya jangka panjang.

Konsep ekowisata juga melibatkan elemen penting dari teori stakeholder *accountability*, yang menekankan tanggung jawab bersama antara masyarakat lokal, pengelola pariwisata, dan pemerintah dalam menjaga ekosistem pesisir (Chan et al., 2021). Pengaturan zonasi yang terintegrasi, seperti pembatasan jumlah pengunjung atau penetapan area konservasi, memerlukan kolaborasi erat yang berlandaskan transparansi dan akuntabilitas (Castrejón et al., 2024). Dalam konteks ini, akuntansi keperilakuan membantu merancang sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya berbasis

indikator ekonomi tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan.

Selain itu, pendidikan lingkungan melalui aktivitas ekowisata dapat berfungsi sebagai mekanisme *social learning* yang efektif (Vinodan & Meera, 2024). Dengan melibatkan wisatawan dan masyarakat lokal dalam program konservasi, seperti penanaman mangrove atau pemantauan terumbu karang, ekowisata dapat meningkatkan kesadaran ekologis dan rasa kepemilikan terhadap sumber daya alam. Teori *intrinsic motivation* dalam akuntansi keperilakuan menekankan pentingnya penghargaan *non-monetary*, seperti pengakuan sosial, untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi (Muhamad et al., 2024).

Pentingnya pengelolaan daya dukung kawasan juga dapat dijelaskan melalui pendekatan *bounded rationality*, di mana keterbatasan informasi dan pemahaman masyarakat sering kali menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang optimal (Zou & Ma, 2021). Dengan menyediakan data yang mudah dipahami, seperti kapasitas lingkungan dan dampak ekonomi jangka panjang, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan ekowisata.

Melalui pendekatan berbasis akuntansi keperilakuan, ekowisata di kawasan pesisir dapat dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tetapi juga untuk menjaga kelestarian ekosistem. Kolaborasi antara masyarakat, wisatawan, dan pemerintah dengan dukungan sistem akuntansi yang partisipatif menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan ekowisata dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan pesisir.

Peran Kemiskinan dalam Pembentukan Ketidakpedulian terhadap Isu Lingkungan

Ketidakpedulian terhadap isu lingkungan sering kali dikaitkan dengan keterbatasan ekonomi yang menyebabkan masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan dasar dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Di masyarakat pesisir, ketergantungan pada plastik sekali pakai menjadi permasalahan utama yang diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses terhadap alternatif yang lebih ramah lingkungan (Aptasari et al., 2024a). Dalam konteks ini, "ketidakpedulian terdidik" mengacu pada individu yang memiliki kesadaran akan dampak negatif konsumsi plastik tetapi tetap mempertahankan kebiasaan tersebut karena keterbatasan ekonomi, kurangnya akses ke solusi yang terjangkau, serta minimnya insentif yang mendorong perubahan perilaku (Zhang et al., 2022; Gössling & Dolnicar, 2022).

Dalam konteks akuntansi keperilakuan, peran kemiskinan dalam pembentukan ketidakpedulian

terhadap isu lingkungan, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah plastik, dapat dianalisis melalui teori perilaku yang menjelaskan bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi keputusan individu atau kelompok dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan lingkungan (de Bruijn & Antonides, 2022). Kemiskinan yang tinggi di daerah pesisir menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan pada individu, memaksa mereka untuk memprioritaskan kebutuhan dasar sehari-hari ketimbang memperhatikan dampak jangka panjang dari perilaku konsumsi mereka terhadap lingkungan.

Menurut teori akuntansi keperilakuan, individu sering kali membuat keputusan berdasarkan informasi yang mereka miliki dan seberapa besar perhatian mereka terhadap biaya dan manfaat jangka panjang. Dalam hal ini, keterbatasan ekonomi di daerah pesisir menyebabkan masyarakat lebih cenderung mengambil keputusan berdasarkan biaya langsung yang lebih rendah, seperti menggunakan produk sekali pakai atau alternatif yang lebih murah, meskipun mereka tahu bahwa solusi ini akan menambah masalah lingkungan. Keterbatasan ini mengarah pada fenomena "*decision bias*" di mana individu cenderung mengabaikan konsekuensi jangka panjang akibat pengaruh tekanan ekonomi saat ini.

Lebih lanjut, rendahnya tingkat pendidikan juga berperan dalam membentuk perilaku ini. Akuntansi keperilakuan menjelaskan bahwa ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak optimal dari perspektif lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh Jambeck et al. (2015), ketidakpedulian terhadap isu ini mencerminkan kegagalan dalam mempertimbangkan eksternalitas negatif, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah.

Di sisi lain, teori konsumsi materialistis yang dikemukakan oleh Bauman dapat membantu menjelaskan fenomena ini. Dalam masyarakat yang terhimpit oleh kemiskinan, individu cenderung mencari solusi yang praktis dan instan untuk memenuhi kebutuhan mereka, meskipun mereka tahu bahwa pilihan tersebut berpotensi merugikan lingkungan (Atanasova & Eckhardt, 2021). Dalam hal ini, keputusan untuk mengonsumsi barang-barang yang murah dan cepat habis, tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya, adalah hasil dari sebuah "*trade-off*" antara keuntungan jangka pendek dan kerugian jangka panjang yang tidak terukur atau kurang dipahami oleh individu.

Berdasarkan pemahaman ini, akuntansi keperilakuan memberikan wawasan bahwa perubahan perilaku terkait pengelolaan sampah plastik di masyarakat pesisir memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mencakup penyuluhan dan pendidikan, tetapi juga perubahan dalam kebijakan ekonomi yang dapat memberikan insentif bagi perilaku yang lebih ramah lingkungan.

Resistensi terhadap Perubahan Perilaku

Resistensi terhadap perubahan perilaku merupakan tantangan besar dalam upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan pengelolaan sampah (Mathew et al., 2023). Hal ini berkaitan erat dengan kecenderungan individu untuk mempertahankan kebiasaan lama meskipun ada alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dari perspektif akuntansi keperilakuan, resistensi ini seringkali disebabkan oleh biaya kognitif yang tinggi dan perasaan tidak nyaman yang muncul ketika individu dihadapkan pada perubahan yang memerlukan usaha ekstra (Repenning et al., 2021). Oleh karena itu, pendekatan berbasis pendidikan dan insentif menjadi sangat penting dalam mengatasi resistensi ini.

Dalam konteks akuntansi keperilakuan, resistensi terhadap perubahan perilaku, khususnya terkait pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dapat dijelaskan melalui pemahaman tentang bagaimana faktor ekonomi, kebiasaan, dan insentif mempengaruhi keputusan individu dalam masyarakat pesisir. Dalam hal ini, resistensi terhadap perubahan perilaku bukan hanya masalah kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif plastik terhadap lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan faktor psikologis dan ekonomi yang membentuk pola perilaku sehari-hari (Tang, 2023).

Menurut teori akuntansi keperilakuan, individu sering kali lebih cenderung untuk mempertahankan perilaku yang sudah terbiasa, meskipun mereka mengetahui konsekuensi negatifnya. Dalam masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan ekonomi, penggunaan plastik sekali pakai dianggap sebagai solusi praktis yang lebih murah dan efisien dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari perspektif akuntansi keperilakuan, ini menggambarkan "*status quo bias*", yaitu kecenderungan untuk mempertahankan kondisi atau kebiasaan yang ada meskipun ada alternatif yang lebih baik dalam jangka panjang, karena perubahan memerlukan usaha dan sumber daya yang seringkali tidak tersedia (Godefroid et al., 2024).

Teori perubahan sosial memiliki relevansi yang besar dalam konteks ini, khususnya dalam memahami bagaimana perubahan perilaku masyarakat dapat tercapai. Perubahan tersebut memerlukan dorongan yang kuat, baik melalui

informasi yang lebih baik, insentif ekonomi, maupun kebijakan yang mendukung transformasi perilaku tersebut. Dalam perspektif akuntansi keperilakuan, untuk mengubah perilaku konsumsi plastik, masyarakat membutuhkan insentif yang jelas dan terjangkau. Insentif ini bisa berupa subsidi bagi alternatif ramah lingkungan atau kebijakan yang memberikan penghargaan kepada mereka yang menunjukkan perilaku lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan (Avelino, 2021). Tanpa insentif yang memadai, masyarakat cenderung akan tetap mempertahankan pola konsumsi plastik yang tidak ramah lingkungan.

Salah satu tantangan besar dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memperbaiki pengelolaan sampah adalah resistensi terhadap perubahan perilaku. Hal ini sering kali disebabkan oleh biaya kognitif yang tinggi dan rasa ketidaknyamanan yang muncul saat individu dihadapkan pada perubahan yang memerlukan usaha ekstra (Repenning et al., 2021). Dari sudut pandang akuntansi keperilakuan, resistensi ini tidak hanya muncul karena kebiasaan yang sudah mendarah daging, tetapi juga karena adanya persepsi bahwa perubahan memerlukan usaha yang lebih besar.

Fenomena ini lebih terasa di kalangan masyarakat pesisir dengan keterbatasan ekonomi, di mana penggunaan plastik sekali pakai dianggap sebagai solusi yang lebih praktis, murah, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini adalah contoh dari "*status quo bias*", yaitu kecenderungan untuk mempertahankan kebiasaan lama meskipun ada alternatif yang lebih baik dalam jangka panjang (Godefroid et al., 2024). Menghadapi kenyataan ini, dibutuhkan insentif ekonomi yang kuat serta kebijakan yang memberikan penghargaan bagi perilaku lebih ramah lingkungan agar masyarakat mau beralih ke alternatif yang lebih berkelanjutan (Avelino, 2021).

Resistensi terhadap perubahan ini juga dipengaruhi oleh "*cognitive dissonance*", ketidaknyamanan yang timbul ketika individu mengetahui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan pengetahuan atau keyakinan mereka (Tretter & Löffler-Stastka, 2024). Dalam konteks ini, meskipun masyarakat pesisir menyadari dampak negatif plastik terhadap lingkungan, mereka mungkin memilih untuk mengabaikan pengetahuan tersebut karena tidak ada insentif yang cukup kuat untuk mengubah kebiasaan mereka yang sudah terbangun. Kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai menjadi lebih mudah karena biaya dan usaha untuk mengubah kebiasaan tersebut terlalu tinggi dalam kondisi ekonomi yang terbatas.

Teori peran tradisional juga memberikan wawasan penting dalam analisis ini. Peran perempuan dalam keluarga di masyarakat pesisir, yang sering kali berfokus pada efisiensi dan

kenyamanan rumah tangga, mendorong penggunaan plastik sekali pakai sebagai solusi praktis yang mudah dan murah (Dalyan et al., 2024). Dari sudut pandang akuntansi keperilakuan, ini mencerminkan keputusan berbasis biaya langsung, di mana pilihan yang paling mudah dan murah (seperti menggunakan plastik sekali pakai) seringkali dipilih meskipun ada dampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan. Hal ini menggambarkan perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan peran sosial.

Untuk mengatasi resistensi ini, pendekatan dalam akuntansi keperilakuan harus melibatkan lebih dari sekadar pemberian informasi atau pendidikan. Dibutuhkan pendekatan yang berbasis insentif yang dapat mengurangi biaya jangka pendek dari perubahan perilaku, seperti pengurangan biaya untuk produk ramah lingkungan atau pemberian penghargaan bagi perilaku yang lebih bertanggung jawab. Di samping itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan tentang manfaat jangka panjang dari mengurangi penggunaan plastik dan pentingnya pengelolaan sampah dapat membantu mengurangi ketidaktahuan yang sering kali menjadi penghalang bagi perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, dari perspektif akuntansi keperilakuan, perubahan perilaku terkait penggunaan plastik sekali pakai di masyarakat pesisir membutuhkan kombinasi antara pendidikan, insentif ekonomi, dan perubahan kebijakan yang dapat mengurangi hambatan yang ada, baik dari sisi ekonomi, kebiasaan, maupun peran sosial yang mempengaruhi perilaku individu.

Upaya Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat untuk Mengurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Sebagai langkah konkret untuk mengatasi masalah ketergantungan pada plastik sekali pakai, pemberdayaan dan pendidikan masyarakat merupakan upaya yang sangat diperlukan (Shamsuddoha et al., 2024). Pendekatan ini harus melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan berbasis komunitas, serta memberikan insentif ekonomi untuk mengurangi hambatan dalam mengadopsi solusi ramah lingkungan (Gilmer et al., 2021).

Selain itu, tantangan utama dalam implementasi program pemberdayaan adalah rendahnya tingkat pendidikan kepala desa dan masyarakat pesisir, yang menghambat pengambilan keputusan berbasis informasi (Diansari et al., 2023). Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas kepala desa melalui pelatihan dan edukasi agar mereka dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung perubahan perilaku masyarakat.

Dalam konteks akuntansi keperilakuan, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir mengenai penggunaan alternatif ramah lingkungan dan pengelolaan sampah plastik dapat dipahami sebagai suatu tantangan yang melibatkan perubahan perilaku. Perubahan ini tidak hanya terkait dengan faktor eksternal seperti insentif atau kebijakan, tetapi juga dengan faktor internal yang mempengaruhi keputusan individu, seperti pengetahuan, motivasi, dan hambatan psikologis atau ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan dan pendidikan masyarakat melalui program yang didanai oleh dana desa menjadi penting, namun menghadapi tantangan yang perlu dipahami dalam kerangka akuntansi keperilakuan (Diansari et al., 2023).

Menurut teori akuntansi keperilakuan, individu dan kelompok sering kali membuat keputusan berdasarkan motivasi yang terpengaruh oleh insentif ekonomi dan persepsi mereka tentang biaya dan manfaat (Ajzen, 1991). Dalam hal ini, jika masyarakat pesisir melihat perubahan perilaku sebagai sesuatu yang memerlukan usaha ekstra tanpa memberikan keuntungan langsung yang nyata, mereka mungkin enggan berpartisipasi. Mengingat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kepala desa, pengambilan keputusan berbasis informasi menjadi kunci dalam mengubah kebiasaan tersebut. Masyarakat yang kurang teredukasi mungkin kurang memahami dampak jangka panjang dari penggunaan plastik sekali pakai, sehingga mereka lebih cenderung mempertahankan perilaku lama karena "*status quo bias*", atau kecenderungan untuk tetap menggunakan solusi yang sudah terbiasa, meskipun ada alternatif yang lebih baik (Hertwig et al., 2024).

Pemberdayaan dan pendidikan dapat membantu mengatasi hambatan ini dengan menyediakan informasi yang lebih jelas mengenai manfaat jangka panjang dari penggunaan alternatif ramah lingkungan, seperti pengurangan biaya jangka panjang atau peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks akuntansi keperilakuan, pendekatan ini bisa disebut sebagai intervensi berbasis informasi yang bertujuan untuk mengurangi ketidaktahuan masyarakat tentang biaya sosial dan lingkungan dari perilaku mereka. Namun, untuk mencapai perubahan nyata, insentif yang lebih konkret juga diperlukan agar masyarakat merasa perubahan ini memberikan keuntungan langsung yang nyata.

Tantangan utama dalam implementasi program pemberdayaan yang melibatkan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai adalah rendahnya tingkat pendidikan kepala desa dan masyarakat. Sebagai pemangku kebijakan yang berada di level lokal, kepala desa memiliki peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang berdampak. Namun, jika mereka memiliki keterbatasan pengetahuan atau keterampilan dalam merencanakan program yang

berkelanjutan, maka keputusan mereka untuk mengalokasikan dana desa mungkin tidak cukup optimal. Hal ini menciptakan "decision bias", yaitu kecenderungan untuk mengutamakan program yang lebih mudah dipahami dan lebih langsung memberikan hasil fisik, seperti pembangunan infrastruktur, daripada program yang lebih abstrak atau memerlukan perubahan perilaku jangka panjang (Wade & Biedenweg, 2024).

Selain itu, preferensi masyarakat yang lebih memilih program pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan sosial merupakan hambatan yang tidak bisa diabaikan. Ini menunjukkan bagaimana perilaku konsumsi materialistis dan *cognitive dissonance* dapat mempengaruhi pilihan mereka, di mana masyarakat lebih memilih hal-hal yang tampak langsung dan nyata, seperti pembangunan infrastruktur, ketimbang investasi dalam program yang mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Dari perspektif akuntansi keperilakuan, hal ini mencerminkan keterbatasan dalam kapasitas mental untuk menilai keuntungan jangka panjang, yang seringkali menjadi hambatan dalam penerapan program-program berbasis pengurangan sampah atau keberlanjutan.

Untuk mengatasi hal ini, pendekatan yang lebih holistik dan sistematis diperlukan. Akuntansi keperilakuan mengajarkan bahwa selain pendidikan dan pemberdayaan, program pemberdayaan juga harus mencakup insentif ekonomi dan psikologis yang dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan perilaku. Misalnya, menyediakan alternatif yang terjangkau dan mudah diakses, serta memberikan penghargaan atau pengakuan bagi masyarakat yang berhasil mengurangi penggunaan plastik, dapat meningkatkan motivasi mereka. Di sisi lain, meningkatkan kapasitas kepala desa melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih tinggi akan membantu mereka merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Dengan demikian, untuk mencapai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di masyarakat pesisir, pendekatan berbasis pendidikan, pemberdayaan, insentif, dan peningkatan kapasitas merupakan langkah penting. Namun, hal ini harus diimbangi dengan pemahaman tentang bagaimana faktor ekonomi, psikologis, dan sosial membentuk keputusan perilaku masyarakat, agar intervensi yang dilakukan lebih efektif dalam menciptakan perubahan yang diinginkan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pengelolaan sumber daya alam di komunitas pesisir Indonesia memerlukan pendekatan yang

inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran aktif masyarakat, terutama nelayan yang terdidik. Tantangan utama dalam perubahan perilaku, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, kebiasaan, dan peran sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada akuntansi keperilakuan menjadi sangat penting, dengan mempertimbangkan hambatan psikologis dan ekonomi yang ada dalam mendorong perubahan perilaku tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor ekonomi, psikologis, dan sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku konsumsi plastik di kalangan masyarakat pesisir. Salah satu fenomena yang ditemukan adalah ketidakpedulian terdidik, di mana meskipun individu sudah menyadari dampak negatif dari konsumsi plastik, mereka tetap mempertahankan kebiasaan tersebut akibat tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Oleh karena itu, untuk mencapai perubahan yang lebih efektif, diperlukan strategi berbasis akuntansi keperilakuan yang tidak hanya memperhitungkan hambatan psikologis, tetapi juga tantangan ekonomi yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam mengubah perilaku konsumsi plastik mereka.

5.2. Saran

Untuk mewujudkan pengelolaan pesisir yang lebih baik, langkah pertama yang perlu diambil adalah meningkatkan pemberdayaan dan pendidikan masyarakat pesisir. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang relevan serta pemberian insentif ekonomi yang jelas, sehingga masyarakat memiliki motivasi dan keterampilan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Selain itu, kebijakan pembangunan pesisir harus didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan co-management. Penerapan pendekatan ini akan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan yang ada, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi lingkungan mereka.

Pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan juga sangat penting. Dengan memperhatikan ketiga dimensi ini secara seimbang, pembangunan pesisir akan menjadi lebih inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, serta membawa manfaat bagi masyarakat pesisir dan pelestarian ekosistem.

Selain itu, kebijakan berbasis co-management perlu diperkuat untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis pada *Scientific Learning Resources* (SLR), kebijakan yang diterapkan akan lebih efektif dalam

mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan, menciptakan pengelolaan pesisir yang lebih baik dan bermanfaat dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Acheson, J. M. (1981). *Anthropology of fishing. Annual Review of Anthropology*, 10(1), 275–316. <https://doi.org/10.1146/annurev.an.10.100181.001423>.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Alhasnawi, M., Said, R. M., Daud, Z. M., & Muhamad, H. (2023). *Budget Participation And Managerial Performance: Bridging The Gap Through Budget Goal Clarity. Advances in Social Sciences Research Journal*, 10(9), 187–200. <https://doi.org/10.14738/assrj.109.15539>
- Ali, A., & Hassan, F. (2024). The Role Of Economic Theory In Shaping Monetary Policy Decisions. *International Journal of Accounting, Finance, and Economic Studies*, 2(1).
- Aptasari, F. W., Falah, M. H., & Akbar, M. M. (2024a). *Transformasi Ritual Adat: Dari Pelestarian Budaya Ke Komoditas Ekonomi. Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(3), 378–395. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i3.1204>
- Aptasari, F. W., Putri, B. K. M., Mujahidi, K., & Hastuti, E. W. (2024b). *Tantangan Penerapan Social Return On Investment (SROI) Di Indonesia: Studi Kasus Pada Wilayah Pesisir. Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 12(2).
- Aseres, S. A., & Sira, R. K. (2020). *Ecotourism Development In Ethiopia: Costs And Benefits For Protected Area Conservation. Journal of Ecotourism*. <https://doi.org/10.1080/14724049.2020.1857390>.
- Atanasova, A., & Eckhardt, G. M. (2021). *The Broadening Boundaries Of Materialism. Marketing Theory*, 21(4), 481–500. <https://doi.org/10.1177/14705931211019077>
- Avelino, F. (2021). *Theories Of Power And Social Change: Power Contestations And Their Implications For Research On Social Change And Innovation. Journal Of Political Power*, 14(3), 425–448. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2021.1875307>
- Avelino, F. (2021). *Theories Of Power And Social Change: Power Contestations And Their Implications For Research On Social Change*

- And Innovation. Journal Of Political Power*, 14(3), 425–448. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2021.1875307>
- Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). *Social Learning Theory* (R. A. Falk & S. S. Kim (eds.); Vol. 1). Englewood cliffs Prentice Hall. <http://taylorandfrancis.com>
- BRIN. (2023, July 3). *BRIN Dukung Keberlanjutan Nelayan Perikanan Tangkap Dan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat*. BRIN. <https://www.brin.go.id/news/113188/brin-dukung-keberlanjutan-nelayan-perikanan-tangkap-dan-perkebunan-kelapa-sawit-rakyat>
- BRIN. (2024, Oktober 31). *Pakar UMKM Sampaikan Tantangan Transformasi UMKM Sektor Kelautan Di Indonesia*. Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN). Retrieved from <https://www.brin.go.id/news/121323/pakar-umkm-sampaikan-tantangan-transformasi-umkm-sektor-kelautan-di-indonesia>
- Budianto, R., Latifah, S. R., Suhardianto, N., & Iswati, S. (2023). *Budaya Akuntansi Indonesia: Praktik Akuntansi Level Keluarga, Masyarakat, Dan Bisnis*. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 63–78.
- Buele, I., Videira, P., Yagüe, J. L., & Cuesta, F. (2020). *The Participatory Budgeting And Its Contribution To Local Management And Governance: Review Of Experience Of Rural Communities From The Ecuadorian Amazon Rainforest*. *Sustainability*, 12(11), 4659. <https://doi.org/10.3390/su12114659>.
- Burgos-Ayala, A., Jiménez-Aceituno, A., & Rozas-Vásquez, D. (2022). *Lessons Learned And Challenges For Environmental Management In Colombia: The Role Of Communication, Education And Participation Strategies*. *Journal for Nature Conservation*, 70, 126281. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2022.126281>
- Castrejón, M., Moity, N., & Charles, A. (2024). *The Bumpy Road To Conservation: Challenges And Opportunities In Updating The Galapagos zoning system*. *Marine Policy*, 163, 106146. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106146>
- Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, T. M. (2021). *Local Community Participation And Responsible Tourism Practices In Ecotourism Destination: A Case Of Lower Kinabatangan, Sabah*. *Sustainability*, 13(23), 13302. <https://doi.org/10.3390/su132313302>.
- Chen, S., Jiang, W., Li, X., & Gao, H. (2021). *Effect Of Employees' Perceived Green HRM On Their Workplace Green Behaviors In Oil And Mining Industries: Based On Cognitive-Affective System Theory*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8), 4056. <https://doi.org/10.3390/ijerph18084056>.
- Chen, Y., Awasthi, A. K., Wei, F., Tan, Q., & Li, J. (2021). *Single-Use Plastics: Production, Usage, Disposal, And Adverse Impacts*. *Science of The Total Environment*, 752, 141772. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141772>
- Cheng, W. J., Ooi, Y. K., & Loke, Y. J. (2023). *An Analysis Of The Financial Impact Of COVID-19 Pandemic On Malaysian Households*. *Southeast Asian Journal of Economics*, 11(2), 45–82.
- Clawson, G., & Frazier, M. (2020, 1 Desember). *2020 Global ocean health index scores*. *Ocean Health Index*. <https://oceanhealthindex.org/news/2020-scores/>.
- Constantino, S. M., Schlüter, M., Weber, E. U., & others. (2021). *Cognition And Behavior In Context: A Framework And Theories To Explain Natural Resource Use Decisions In Social-Ecological Systems*. *Sustainability Science*, 16(6), 1651–1671. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-00989-w>.
- Dalyan, M., Syarifuddin, Yulandari, Mastang, Suma, M., & Sosrohadi, S. (2024). *Harmony And Sustainability: Traditional Ecological Knowledge Systems Of The Kaluppini Indigenous People*. *International Journal of Religion*, 5(6), 82-92. <https://doi.org/10.61707/tdyqck03>.
- de Bruijn, E. J., & Antonides, G. (2022). *Poverty And Economic Decision Making: A Review Of Scarcity Theory*. *Theory and Decision*, 92, 5–37. <https://doi.org/10.1007/s11238-021-09802-7>
- Demirci, S., Reid, A., Teksöz, G., & Sahin, E. (2024). *Systems Literacy: Towards A Conspectus And Model For Environmental And Sustainability Education*. *Environmental Education Research*, 1–36. <https://doi.org/10.1080/13504622.2024.2409959>.
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Binti Othman, J. (2023). *Factors Affecting Village Fund Management Accountability In Indonesia: The Moderating Role Of Prosocial Behaviour*. *Cogent Business & Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>
- Dias, A. C. E., Cinti, A., Parma, A. M., et al. (2020). *Participatory Monitoring Of Small-Scale Coastal Fisheries In South America: Use Of*

- Fishers' Knowledge And Factors Affecting Participation*. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 30(3), 313–333. <https://doi.org/10.1007/s11160-020-09602-2>
- Diaz-Strong, D. X. (2025). *Nested Contexts Of Support: How The Local Context Shapes School Agents' Support Of Undocumented Students*. *Children and Youth Services Review*, 170, 108130. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108130>
- Doaly, T. (2023). *Outlook KNTI: 80% nelayan kecil berpendidikan di bawah SMP*. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2023/02/17/outlook-knti-80-nelayan-kecil-berpendidikan-di-bawah-smp/>.
- Etim, E. (2024). *Leveraging Public Awareness And Behavioural Change For Entrepreneurial Waste Management*. *Heliyon*, 10, e40063. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40063>
- Falah, M. H., & Aptasari, F. W. (2023). *Tantangan Koperasi Nelayan Sebagai Penyeimbang Rezim Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Indonesia*. Dalam K. Amri, H. Latuconsina, & R. Triyanti (Ed.), *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan* (507–548). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.908.c765 E-ISBN: 978-623-8372-50-8.
- Ferguson, T., Roofe, C., & Cook, L. D. (2021). *Teachers' Perspectives On Sustainable Development: The Implications For Education For Sustainable Development*. *Environmental Education Research*. <https://doi.org/10.1080/13504622.2021.1921113>.
- Ferreira, J. C., Vasconcelos, L., Monteiro, R., Silva, F. Z., Duarte, C. M., & Ferreira, F. (2021). *Ocean Literacy To Promote Sustainable Development Goals And Agenda 2030 In Coastal Communities*. *Education Sciences*, 11(2), 62. <https://doi.org/10.3390/educsci11020062>.
- Gerungan, K. K. I., Darmastuti, R., & Kristiyani, D. N. (2024). *Strategi Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Mensosialisasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (Studi Kasus Nelayan Kota Tegal)*. *Scriptura*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.9744/scriptura.14.1.1-13>
- Gilmer, T. P., Center, K., Casteel, D., & others. (2021). *Developing Trauma Resilient Communities Through Community Capacity-Building*. *BMC Public Health*, 21(1681). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11723-7>.
- Godefroid, M., Gan, Y., Hüls, G., Plattfaut, R., & Niehaves, B. (2024). *Addressing Status Quo Bias To Turn A Failing Decision System Introduction Around: The Case Of DB Schenker*. *Journal of Decision Systems*, 1–30. <https://doi.org/10.1080/12460125.2024.2410515>
- Gómez, S., & Maynou, F. (2021). *Balancing Ecology, Economy And Culture In Fisheries Policy: Participatory Research In The Western Mediterranean Demersal Fisheries Management Plan*. *Journal of Environmental Management*, 291, 112728. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112728>.
- Gössling, S., & Dolnicar, S. (2022). *A Review Of Air Travel Behavior And Climate Change*. *WIREs Climate Change*, 14(1), e802. <https://doi.org/10.1002/wcc.802>
- Hanlon, M., Yeung, K., & Zuo, L. (2022). *Behavioral economics of accounting: A review of archival research on individual decision makers*. *Contemporary Accounting Research*, 39(2), 1150–1214. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12739>.
- Hanlon, M., Yeung, K., & Zuo, L. (2022). *Behavioral Economics Of Accounting: A Review Of Archival Research On Individual Decision Makers*. *Contemporary Accounting Research*, 39(3), 1150–1214. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12739>
- Huang, C. -C., Chan, Y. -K., & Hsieh, M. Y. (2022). *Preliminary research on the sustainable determinants of Taiwanese ecotourism with the international standards*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21), 14489. <https://doi.org/10.3390/ijerph192114489>.
- IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change]. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation And Vulnerability*. IPCC Sixth Assessment Report. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>.
- Jasmin, P. R., Mabel, S., Mowainop, A., Watkuk, F., & Oja, H. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Basis Perubahan Sosial*. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 1(4), 295–304.
- KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). (2024, Desember 17). *Menteri Trenggono Sukses Tingkatkan PDB Perikanan Di 2024*. KKP Web. Retrieved from <https://kkp.go.id/news/news-detail/menteri-trenggono-sukses-tingkatkan-pdb-perikanan-di-2024-57n8.html>
- KKP. (2023). *Jumlah Nelayan Budidaya Di Indonesia (2012-2020)*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer>.

- Kristianto, A. H., Siahaan, S. V. B., & Vuspitasari, B. K. (2022). *Potensi Pengembangan Ekonomi Sirkular Kerakyatan Dan Solusi Permasalahan Sampah Tidak Terkelola (Studi Kasus Desa Sungai Duri Kabupaten Bengkayang)*. *Jurnal Maneksi*, 11(1). <https://doi.org/10.31959/jm.v11i1.1069>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. (2024). *Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik*. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585 - . <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7224>
- Lee, C.-K., Olya, H., Ahmad, M. S., Kim, K. H., & Oh, M.-J. (2021). *Sustainable Intelligence, Destination Social Responsibility, And Pro-Environmental Behaviour Of Visitors: Evidence From An Eco-Tourism Site*. *Journal of Hospitality and Tourism Management*. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.04.010>
- Lehtonen, P., & Radzik-Maruszak, K. (2024). *Inclusion As Ownership In Participatory Budgeting: Facilitators' Interpretations Of Public Engagement Of Children And Youth*. *Critical Policy Studies*, 18(1), 73–91. <https://doi.org/10.1080/19460171.2023.2192412>
- Litvinenko, V., Bowbrick, I., Naumov, I., & Zaitseva, Z. (2022). *Global Guidelines And Requirements For Professional Competencies Of Natural Resource Extraction Engineers: Implications For ESG Principles And Sustainable Development Goals*. *Journal of Cleaner Production*, 338, 130530. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.13053>
- Marasabessy, I., Katili, V. R. A., Ulat, M. A., Kadarusman, K., Suruwaky, A. M., Ismail, Tabalessy, R. (2022). *Penilaian EAFM Pada Domain Teknik Penangkapan Ikan Di Pulau Sangat Kecil Terluar Dan Terdepan Indonesia (Studi Kasus Gugus Pulau Ayau, Raja Ampat)*. *Jurnal Enggano*, 7(2), 156–174.
- Marasabessy, I., Bahalwan, F., Badarudin, M. I., Fahrudin, A., Imran, Z., & Agus, S. B. (2023). *Pengelolaan Wilayah Kepulauan Timur Indonesia Untuk Mencegah Tragedy Of The Commons*. In K. Amri, H. Latuconsina, & R. Triyanti (Eds.), *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan* (pp. 549–592). Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.908.c766>
- Mathew, A., Isbanner, S., Xi, Y., Rundle-Thiele, S., David, P., Li, G., & Lee, D. (2023). *A Systematic Literature Review Of Voluntary Behaviour Change Approaches In Single Use Plastic Reduction*. *Journal of Environmental Management*, 336, 117582. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117582>
- Md, A., Gomes, C., Dias, J. M., & Cerdà, A. (2022). *Exploring Gender and Climate Change Nexus, and Empowering Women in the South Western Coastal Region of Bangladesh for Adaptation and Mitigation*. *Climate*, 10(11), 172. <https://doi.org/10.3390/cli10110172>
- Muhamad, A., Kiyangi, F.-P., & Namugumya, E. (2024). *Non-Monetary Intangible Rewards And Teacher Performance In Secondary Schools In The Central Region Of Uganda*. *Journal of Research in Education and Technology*, 2(2), 39–50. <https://doi.org/10.69897/joret.v2i2.122>
- Mustofa, M. A. (2022). *The role of ecotourism in the social and economic field*. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 2022(25), 65–73. <https://doi.org/10.11594/nstp.2022.2510>
- Ortiz-Riomalo, J. F., Koessler, A.-K., & Engel, S. (2022). *Fostering Co-Operation Through Participation In Natural Resource Management: An integrative review*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4093075>
- Pebrianto, F. (2020, 8 September). *Kontribusi sektor kelautan dan perikanan ke PDB baru 3,7 persen*. *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1383928/kontribusi-sektor-kelautan-dan-perikanan-ke-pdb-baru-37-persen>
- Pinsky, M. L., Worm, B., Fogarty, M. J., Sarmiento, J. L., & Levin, S. A. (2013). *Marine Taxa Track Local Climate Velocities*. *Science*, 341(1), 1239–1242. <https://doi.org/10.1126/science.1239352>
- Putra, B. M., Suri, E. W., Saputra, W. A., Manalu, E., & Banjarnahor, G. A. (2023). *Kemiskinan Di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu: Akar Masalah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya*. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 12(2), 230.
- Quamme, S. H., & Iversen, P. O. (2022). *Prevalence Of Child Stunting In Sub-Saharan Africa And Its Risk Factors*. *Clinical Nutrition Open Science Elsevier B.V*, 42, 49-61. <https://doi.org/10.1016/j.nutos.2022.01.009>
- Repenning, N., Löhlein, L., & Schäffer, U. (2021). *Emotions In Accounting: A Review To Bridge The Paradigmatic Divide*. *European Accounting Review*. <https://doi.org/10.1080/09638180.2021.1908906>
- Samal, R., & Dash, M. (2023). *Ecotourism, Biodiversity Conservation And Livelihoods: Understanding The Convergence And Divergence*. *International Journal of*

- Geoheritage and Parks, 11(1), 1-20. <https://doi.org/10.1016/j.jigeop.2022.11.001>.
- Sari, D., Nugroho, F., & Warningsih, T. (2020). *The Influence Of "Program Keluarga Harapan (PKH)" On The Income Level Of Fishers At Bagan Hulu, Bangko Sub-Regency, Rokan Hilir regency*. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(2), 251–258.
- Septanti, D., Santoso, E. B., Cahyadini, S., Setyawan, W., Utami, A. S. P. R., & Amiroh. (2023). *Criteria For Sustaining Coastal Communities' Livelihoods: A Case Study Of Karang Sari Urban Village, Tuban Regency*. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development D: Planning Assessment*, 11(2), 278–293. https://doi.org/10.14246/irpsd.11.2_278.
- Shamsuddoha, M., & Kasheem, M. A. (2024). *Zero Plastic Drive: A Comprehensive Review on Unveiling Innovative Sustainable Solutions for a Circular Plastics Economy*. *Sustainability*, 16(23), 10329. <https://doi.org/10.3390/su162310329>.
- Sobhani, P., Esmailzadeh, H., Sadeghi, S. M. M., Wolf, I. D., & Deljouei, A. (2022). *Relationship Analysis Of Local Community Participation In Sustainable Ecotourism Development In Protected Areas, Iran*. *Land*, 11(10), 1871. <https://doi.org/10.3390/land11101871>.
- Suhartanti, R., Suharso, P., & Ani, H.M. (2022). *Gaya Hidup Masyarakat Nelayan Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 16(1), 27–32. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.22459>.
- Suryawan, I. W. K., & Lee, C.-H. (2024). Exploring citizens' cluster attitudes and importance-performance policy for adopting sustainable waste management practices. *Waste Management Bulletin*, 2(3), 204–215. <https://doi.org/10.1016/j.wmb.2024.07.011>.
- Tang, K. H. D. (2023). *Attitudes Towards Plastic Pollution: A Review And Mitigations Beyond Circular Economy*. *Waste*, 1, 569–587. <https://doi.org/10.3390/waste1020034>
- Tretter, F., & Löffler-Stastka, H. (2024). Cognitive dissonance and mindset perturbations during crisis: “eco-socio-psycho-somatic” perspectives. *World Journal of Psychiatry*, 14(2), 215-224. <https://doi.org/10.5498/wjp.v14.i2.215>
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). *Judgment Under Uncertainty: Heuristics And Biases*. *Science*, 185(4157), 1124–1131. <https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>
- van Klingeren, F., & de Graaf, N. D. (2021). *Heterogeneity, Trust, And Common-Pool Resource Management*. *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 11(1), 37–64. <https://doi.org/10.1007/s13412-020-00640-7>.
- Vasseur, L. (2021). *How Ecosystem-Based Adaptation To Climate Change Can Help Coastal Communities Through A Participatory Approach*. *Sustainability*, 13(4), 2344. <https://doi.org/10.3390/su13042344>.
- Vierros, M. K., Harrison, A.-L., Sloat, M. R., Ortuño Crespo, G., Moore, J. W., Dunn, D. C., Ota, Y., Cisneros-Montemayor, A. M., Shillinger, G. L., Watson, T. K., & Govan, H. (2020). *Considering Indigenous Peoples And Local Communities In Governance Of The Global Ocean Commons*. *Marine Policy*, 119, 104039. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104039>
- Voo, J. Y. H., Lean, Q. Y., Ming, L. C., Md. Hanafiah, N. H., Al-Worafi, Y. M., & Ibrahim, B. (2021). *Vaccine Knowledge, Awareness, And Hesitancy: A Cross-Sectional Survey Among Parents Residing At Sandakan District, Sabah*. *Vaccines*, 9(11), 1348. <https://doi.org/10.3390/vaccines9111348>.
- Wade, E., & Biedenweg, K. (2024). *Trade-Offs In Fishing Strategy Decisions And Conservation Implications For Small-Scale Fisheries*. *Environmental Conservation*, 51(3), 179–187. doi:10.1017/S0376892924000134.
- Walhi. (2022). *Jumlah Nelayan di Indonesia Terus Menurun Akibat Krisis Iklim dan Industri Ekstraktif*. <https://www.walhi.or.id/jumlah-nelayan-di-indonesia-terus-menurun-akibat-krisis-iklim-dan-industri-ekstraktif>.
- Wasiaturrahma, Sulistyowati, C., Heryati, D., & Ajija, S. R. (2020). *Improving The Cooperative Performance Through Financial Management Assistance In Koperasi 64 Surabaya*. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(1), 256–267. <https://jurnal.unpad.ac.id/jpk/article/view/1415#:~:text=Hasil%20penelitian%20menunjukkan%20bahwa%20kontribusi,tangga%20didominasi%20oleh%20wanita%20nelayan>.
- Yaslan, M., Sidiq, R. S., & Tantoro, S. (2023). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandar Bakau Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 24(1), 41–54.
- Zhang, A., Alvi, M. F., Gong, Y., & Wang, J. X. (2022). *Overcoming Barriers To Supply Chain Decarbonization: Case Studies Of*

- First Movers*. Resources, Conservation and Recycling, 186, 106536. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106536>.
- Zhang, Y., Lu, X., Zou, Y., & Lv, T. (2022). *Nudging Strategies For Arable Land Protection Behavior In China*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(19), 12609. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912609>.
- Zhao, B., Cheah, P. K., & Moses, P. (2022). *Study On The Effect Of Education On Poverty Reduction From The Perspective Of Multidimensional Urban Poverty*. Educational Administration: Theory and Practice, 28(4), 74–90. <https://doi.org/10.17762/kuey.v28i4.483>
- Zikargae, M. H., Woldearegay, A. G., & Skjerdal, T. (2022). *Empowering Rural Society Through Non-Formal Environmental Education: An Empirical Study Of Environment And Forest Development Community Projects In Ethiopia*. Heliyon, 8(3), e09127. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09127>.
- Zou, H., & Ma, X. (2021). *Identifying Resource And Environmental Carrying Capacity In The Yangtze River Economic Belt, China: The Perspectives Of Spatial Differences And Sustainable Development*. Environmental Development and Sustainability, 23, 14775–14798. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01477-5>
- Zulfa, D. N. A., & Susanti, R. (2023). *Kehidupan Nelayan Tradisional Di Perkotaan*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(5), 2712–2721. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11492>.